

**MERINTIS SEKOLAH DI ERA PEMBANGUNAN:
SEJARAH PPSP - IKIP PADANG 1972-1987**

TESIS



Oleh

**ALMASRI
NIM 20170**

**PRODI PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

Abstract

Almasri. 2016. Initiating School in Development Era : History PPSP IKIP PADANG 1972 – 1987, Study Program Social Science. Thesis Graduate Program of Padang State University

PPSP IKIP Padang is one of eight school which are built by government in the purpose of trial and error project of education renewal in Indonesia. Different from other common school, PPSP is run by PPSP project underneath BP3K association (Association of research of education and culture development). This research is aimed to describe the delivery and development of PPSP IKIP Padang until the change to laboratory development school (UNP). This research is analysed by AGIL paradigm (Adaptation, Goal attainment, Integration and Latent pattern-maintenance) Talcott Parson. The steps in this historical research are, heuristic, critique, interpretation and historiography. Of study in documentation and interview of historical people of PPSP IKIP Padang and Laboratory Development School UNP.

The finding of the research shows that the Rector of IKIP Padang Prof. Dr. Isrin Nurdin played role very much toward the fact that IKIP Padang was chosen as the committee of PPSP IKIP Padang. That Government provided the complete school equipment and the chosen educations from lecturer assistant, lecturer and teacher from education and culture department of West Sumatra province, as well as the fund that was provided by the government really affected the quality of education in PPSP IKIP Padang. PPSP IKIP Padang applied the schooling system 8+3, beside the various education skill as the part of comprehensive school from the level of elementary until senior high school. The curriculum structure of PPSP has nationally become the basic of curriculum of elementary, junior and senior high school until now. The study in PPSP IKIP Padang uses the modul system with the basic of mastery learning and continuous progress which optimized the student's abilities in studying, being independent and progressing based on the each ability as well as the service of consulting and guiding. This education has created the graduation whom are known in some occupation in Indonesia. PPSP IKIP incorporated with PT Padang Cement by creating comparative laboratory elementary school IKIP Padang 1974-1989 as the shape of decimation.

The funding source of PPSP project was ended in 1986, so that the PPSP IKIP Padang was dismissed. The building ex. PPSP IKIP Padang and supporting tools were lent to education and culture regional official West Sumatra, so that the model elementary school, junior high school 26 Padang and senior high school 8 Padang have been built since 1986/1987. In 1990, YPKK IKIP Padang began to build Development Senior High School KORPRI IKIP Padang. In 1990, UNP started to take part the school underneath YPKK UNP conducted by the Director of Development School including elementary, junior, and senior high school of laboratory development UNP.

ABSTRAK

Almasri. 2016. Merintis Sekolah di Era Pembangunan : Sejarah PPSP - IKIP Padang 1972 - 1987, Prodi IPS Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang

PPSP IKIP Padang adalah salah satu dari delapan sekolah yang dibangun pemerintah dalam rangka proyek uji coba pembaharuan pendidikan di Indonesia. Berbeda dengan sekolah umum lainnya, PPSP dikelola oleh Proyek PPSP dibawah lembaga BP3K (Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lahir dan perkembangan PPSP IKIP Padang sampai peralihan ke Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP.

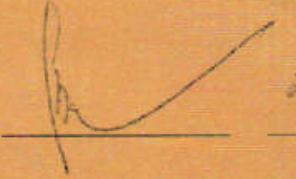
Penelitian ini dianalisis dengan paradigma AGIL (*adaption. Goal attainment, integration dan Laten pattern-maintenance*) Talcot Parson. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah ini adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi dari studi dokumentasi dan wawancara para pelaku sejarah PPSP IKIP Padang dan Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rektor IKIP Padang Prof. Dr. Isrin Nurdin berperan sangat besar terhadap dipilihnya IKIP Padang sebagai penyelenggara PPSP IKIP Padang. Pemerintah menyediakan Sarana prasana sekolah yang lengkap dan tenaga kependidikan yang terpilih dari asisten dosen, dosen muda dan guru terpilih dari Dinas P dan K Propinsi Sumatera Barat, serta besarnya dana yang disediakan pemerintah sangat mempengaruhi kualitas pendidikan PPSP IKIP Padang. PPSP IKIP Padang menerapkan sistem persekolahan 8 + 3, disamping adanya pendidikan keterampilan yang beragam sebagai bagian *comprehensive school* mulai dari jenjang SD sampai SMA. Struktur kurikulum PPSP menjadi dasar pelaksanaan kurikulum SD, SMP dan SMA secara nasional sampai saat ini. Pembelajaran di PPSP IKIP Padang menggunakan sistem modul dengan prinsip *mastery learning* (belajar tuntas) dan *continus progress* (maju berkelanjutan) yang mengoptimalkan kemampuan siswa dalam belajar, mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing serta adanya layanan Bimbingan dan Penyuluhan. Pendidikan ini telah menghasilkan alumni yang dikenal di berbagai bidang pekerjaan di Indonesia. PPSP IKIP menjalin kerjasama dengan PT Semen Padang dengan membentuk SD Laboratorium Komparasi IKIP Padang 1974 - 1989 sebagai bentuk desiminasi.

Sumber dana Proyek PPSP habis tahun 1986, sehingga PPSP IKIP Padang dibubarkan. Gdung ex PPSP IKIP Padang dan sarana pendukungnya dipinjamkan ke Kanwil P dan K Sumatera Barat sehingga berdiri SD Percobaan, SMP N 26 Padang dan SMA N 8 Padang mulai tahun pelajaran 1986/1987. Pada tahun 1990 YPKK IKIP Padang mulai mendirikan SMA Pembangunan KORPRI IKIP Padang. Pada tahun 2009 UNP mulai mengambil alih sekolah di bawah YPKK UNP yang dipimpin Direktur Sekolah Pembangunan yang SD, SMP dan SMA Pembangunan Laboratorium UNP.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *Almasri*
NIM. : 20170

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> Pembimbing I		20/3/2016
<u>Dr. Buchari Nurdin, M.Si.</u> Pembimbing II		29/7/2016

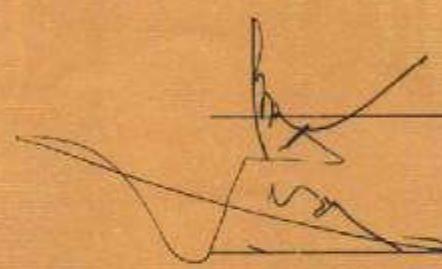
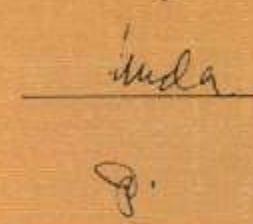
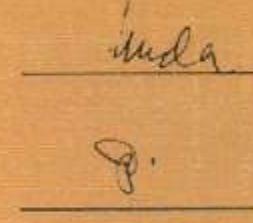
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang


Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Ketua Program Studi/Konsentrasi


Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum</u> <i>(Ketua)</i>	
2	<u>Dr. Buchari Nurdin, M.Si.</u> <i>(Sekretaris)</i>	
3	<u>Dr. Jasrial, M.Pd.</u> <i>(Anggota)</i>	
4	<u>Dr. Lindayanti, M.Hum.</u> <i>(Anggota)</i>	
5	<u>Dr. Paus Iskarni</u> <i>(Anggota)</i>	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Almasri*
NIM. : 20170
Tanggal Ujian : 28 - 6 - 2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul **“Merintis Sekolah Di Era Pembangunan : Sejarah PPSP - IKIP Padang 1972 - 1987**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Dosen Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas, dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan susungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sangsi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Mei 2016



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat petunjuk serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya ke jalan kebenaran, jalan yang diridhoi Allah SWT. Adapun permasalahan yang dibahas pada tesis ini dengan judul **“Merintis Sekolah Di Era Pembangunan : Sejarah PPSP IKIP Padang 1972 - 1987”**

Sebagai manusia biasa peneliti tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih semoga apa yang peneliti terima dalam menyelesaikan tesis ini menjadi amal baik dan diberi pahala oleh Allah SWT. Aamiin. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang Prof. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D, yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi di pasca sarjana UNP.
2. Ketua Program Studi Pendidikan IPS Prof. Dr. Agusti Efi, M.A, yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan selama menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Pembimbing I Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum, yang telah memberikan bimbingan berupa masukan dan kritikan yang membangun sehingga selesaiya tesis ini

4. Bapak Pembimbing II Dr. Buchari Nurdin, M.Si, M.Pd, yang telah memberikan saran-saran kepada peneliti.
5. Ibu Pengaji I Dr. Lindayanti, M.Hum, Bapak Pengaji II Dr. Paus Iskarni, M.Pd dan Bapak Pengaji III Dr. Jasrial, M.Pd, yang telah memberikan masukan dan kritikan serta saran-saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Prayitno M.Sc. Ed, Direktur Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP yang telah banyak memberikan motivasi dan sekaligus sebagai narasumber dalam penelitian ini
7. Bapak Drs. Sabri Zubir dan Ibu Rosti Irawati, Ibu Yustini Makruf, Bapak Drs. Syafril Rahim, Bapak Drs. Achyar Sikumbang dan Bapak Drs. Yusri, M.Pd guru-guru PPSP IKIP Padang yang telah banyak memberikan informasi dalam penelitian ini.
8. Teman-teman Alumni PPSP khususnya Panitia Iluni PPSP 2016, Ibu Dra. Tanggo Olina, Dra. Ratna Juita, Dra. Yessemina Yarmia yang telah banyak berbagi sumber dan informasi tentang PPSP.
9. Kedua orang tua (Alm/Almh) dan adik-adik tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat.
10. Teristimewa kepada isteri tercinta Dra Hamimah, M.Pd dan anak-anak tersayang Bryan Razhes Wicaksono, Bobby Prasetya Adiguna, Ketty Putri Dehaal, Adityo Putra Dehaal dan Ichsan Budi Laksono yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabat yang selalu bersama dalam suka dan duka para guru dan staf administrasi SMA Pembangunan Laboratorium UNP, MKKS SMA Swasta

Kota Padang dan teman-teman FKGS Sumatera Barat khususnya Drs. Wahdini Purba yang banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih kurang sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritikan yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin...aamiin Yaa Rabbal'alamin.

Padang, Mei 2016

Almasri

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Inovasi Pendidikan	10
2. Comprehensive School.....	15
B. Penelitian Relevan	19
C. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian.....	26
B. Informan Penelitian.....	27
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV. HASIL PENELITIAN	30
A. Temuan Umum	30
1. Sejarah Berdirinya PPSP IKIP Padang	30
2. Kesiapan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Sekolah.....	34

a.	Gedung (Ruang Kelas) dan Sarana-Prasarana Lainnya	35
b.	Tenaga Pendidik dan Administrasi Sekolah	35
c.	Struktur dan Manajemen Pengelolaan Sekolah.....	41
d.	Sistem Persekolahan.....	44
e.	Jenjang Pendidikan.....	46
f.	Program dan Kegiatan Sekolah.....	48
g.	Dukungan Pemerintah dan Masyarakat	57
B.	Temuan Khusus	62
1.	PPSP IKIP Padang	62
2.	Gagasan Tentang Comprehensive School.....	63
3.	Sistem Pendidikan dan Kurikulum Sekolah PPSP IKIP Padang	64
a.	Struktur Program Kurikulum	64
b.	Sistem Pengajaran dengan Modul	67
c.	Garis-garis Besar Program Pengajaran	71
d.	Penyelenggaraan dan Perkembangan Pendidikan PPSP IKIP Padang 1972 – 1987	73
e.	Desiminasi Sekolah PPSP IKIP Padang	75
4.	Masa Peralihan PPSP IKIP Padang ke Sekolah Pembangunan	76
a.	Masa Yayasan Pendidikan Kesejahteraan KORPRI UNP	78
b.	Masa Direktur Sekolah Pembangunan 2009 sampai Sekarang... ..	81
C.	Pembahasan.....	87
BAB V.	PENUTUP.....	109
A.	Kesimpulan	109
B.	Implikasi	111
C.	Saran-saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA	115
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Lokasi Sekolah PPSP dalam kompleks IKIP Padang	30
Gambar 2. Denah PPSP IKIP Padang.....	35
Gambar 3. Struktur organisasi SD SMP PPSP	45
Gambar 4. Struktur organisasi SMA SMP PPSP	46
Gambar 5. Jenjang pendidikan PPSP	47
Gambar 6. Struktur organisasi BP.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Lampiran 2 : Foto Wawancara

Lampiran 3 : Petunjuk Guru dan modul

Lampiran 4 : Rapor dan STTB PPSP

Lampiran 5 : a. SK Pendirian Sekolah Laboratory School IKIP Padang

b. SK Penyerahan Sekolah PPSP ke Kanwil P dan K Sumatera Barat

c. SK Pendirian Sekolah SMA Pembangunan KORPRI IKIP Padang

d. SK Pemberhentian Pengurus YPKK IKIP Padang

e. SK Pembentukan Pengurus Sekolah Laboratorium UNP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru, sektor pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Walaupun pada tahap awal Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I), prioritas utama dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi dan pertanian, namun sesungguhnya pemerintah senantiasa berupaya melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pemberian di berbagai bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pembangunan di bidang pendidikan sejalan dengan amanat konstitusi pada Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pengajaran nasional, dan diatur dalam undang-undang.” Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara* (GBHN) menegaskan bahwa tujuan pendidikan dan kebudayaan nasional adalah sebagai berikut:¹

“Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah”.

Untuk mencapai tujuan pendidikan ini pemerintah Orde Baru melaksanakan usaha yang terencana, terus menerus dan dalam berbagai bidang pendidikan dalam menuju kemajuan bangsa. Begitu luasnya bidang pendidikan dan kebudayaan maka tanggung jawabnya tidak hanya melibatkan pemerintah,

¹ Pidato Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di depan Sidang Umum MPR Tanggal 11 Maret 1978. Lebih lanjut lihat Ladin Girsang, *Indonesia Sejak Orde Baru*, Yayasan Laita, Jakarta - Indonesia, hal. 70-71.

tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Pemerintah mendorong setiap individu dan masyarakat begeraka dalam bidang pendidikan sehingga muncul sekolah-sekolah formal dan lembaga-lembaga keterampilan pendidikan yang dikelola oleh individu dan masyarakat. Peningkatan dan pengembangan di sektor pendidikan diasumsikan kelak akan mendongkrak pertumbuhan di bidang ekonomi serta bidang-bidang kehidupan lainnya. Realitas ini didukung pula dengan kenaikan harga minyak dunia sehingga pemerintah Orde Baru memiliki cukup anggaran pembiayaan untuk melengkapi serta pembangunan sarana dan prasarana fisik, terutama pembangunan gedung sekolah dasar dapat dibangun hingga ke pelosok desa di seluruh Indonesia.

C.E. Beeby² menggambarkan bahwa dalam Pelita I (1969-1974) anggaran pembangunan untuk Departemen Pendidikan adalah sebesar Rp. 36,6 miliar atau 3,4% dari keseluruhan anggaran pembangunan pemerintah. Sementara, pada Pelita II pos tersebut melonjak drastis menjadi Rp. 436 miliar, atau mengalami kenaikan 12 kali. Peningkatan anggaran pembiayaan di bidang pendidikan tersebut, menurut C.E. Beeby, Indonesia adalah satu Negara berkembang terbesar yang pemerintahannya tiba-tiba kejatuhan rezeki dan mendadak jadi kaya seperti itu.³

² C.E. Beeby adalah doctor Psikologi yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Selandia Baru dan pernah menjadi konsultan untuk pembaharuan dan perencanaan pendidikan di 10 negara di kawasan Asia, Afrika, Pasifik Selatan dan Karibia. Ia juga pernah bertugas selama enam tahun (1970-1975) sebagai konsultan tamu pada Ford Foundation di Indonesia. Laporan dan arahannya kepada para pengambil kebijakan dan petugas-petugas penelitian di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diterbitkan menjadi buku dengan judul *Indonesia Education, An Experiment in Assessment* (1979), dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia, *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, Jakarta: LP3ES (1982).

³ C.E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, Jakarta: LP3ES (1982), hal. 1-2.

Peningkatan anggaran pembangunan di atas membuat pemerintah selama Repelita II mampu merealisasikan pembangunan 31.000 gedung Sekolah Dasar (SD) masing-masing enam kelas, pembangunan 15.000 ruang kelas baru di SD yang sudah ada, rehabilitasi 56.000 gedung SD Negeri dan Swasta, pengangkatan 224.000 guru termasuk 31.000 guru agama, penataran 634.000 guru, penyediaan 248 juta buku teks pelajaran dan 45 juta buku bacaan untuk perpustakaan. Sementara, untuk sekolah lanjutan, pemerintah juga melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi lebih kurang 1.500 gedung SMP Negeri serta 500 gedung SMA Negeri.⁴

Tabel 1: Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SD-SLTP dan SLTA di Sumatera Barat Tahun 1969 - 1975

TAHUN / PELITA	SD			SLTP			SLTA		
	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
PELITA-I									
1969	1,907	407,116	12,737	197	42,334	2,345	78	18,461	1,017
1970	1,964	419,369	12,551	198	41,900	2,581	80	20,801	1,245
1971	2,022	395,775	12,570	199	41,779	2,661	75	22,883	1,057
1972	2,038	397,083	12,196	198	41,063	2,661	79	22,396	1,380
1973	2,027	401,166	12,080	195	41,978	2,544	75	21,949	1,327
PELITA - II									
1974	2,172	413,923	13,297	198	46,439	3,245	84	21,949	1,737
1975	2,384	436,687	14,371	205	46,051	2,756	80	25,317	1,792

Sumber Data : Diolah dari Ladin Girsang, *Indonesia Sejak Orde Baru*, Yayasan Laita Jakarta - Indonesia, hal. 634-635.

Namun, dibalik angka-angka di atas, dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah berat dan dilematis, yang dapat dikategorikan menjadi: a) *internalin-efficiency*, b) *externalin-efficiency*, dan c) ketidakmerataan

⁴ Ladin Girsang, *Indonesia Sejak Orde Baru*, Yayasan Laita Jakarta - Indonesia, hal. 70-71.

kesempatan pendidikan. *Internalin-efficiency* dalam sektor pendidikan berwujud dalam bentuk tingginya angka *drop-outs* dan angka *repeaters* (ulang kelas yang sama). Sedangkan *externalin-efficiency* berwujud lulusan pendidikan tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerja ataupun dapat dipakai tetapi antara pekerjaan yang dilakukan berbeda dengan pendidikan yang diperoleh. Sedang ketidakmerataan pendidikan berwujud adanya perbedaan memperoleh kesempatan pendidikan antara laki-laki dan wanita, antara penduduk kota dan penduduk desa dan antara kaya dan miskin.

Kesadaran bahwa pendidikan harus senantiasa tanggap terhadap kemajuan telah mendorong para ahli dan pengambil keputusan di bidang pendidikan untuk terus menerus mengadakan pembaharuan. Pembaharuan pendidikan secara langsung dimaksudkan untuk memecahkan ketiga problema di atas: *internalin-efficiency*, *externalin-efficiency*, dan ketidakmerataan pendapatan. Secara tidak langsung, perubahan-perubahan di sektor pendidikan: misalnya, perubahan struktur pendidikan dan kurikulum, baik dalam arti content dan *instructional delivery system*, merupakan upaya agar pendidikan menjadi *agent of development* yang canggih.

Namun pembaharuan-pembaharuan yang dilaksanakan tidak jarang mengandung kelemahan dan perlu untuk dikritik. Salah satu kritik yang pernah dilontarkan oleh Winarno Surakhmad (1986)⁵ yang menilai bahwa pembaharuan pendidikan di Indonesia bersifat tambal sulam dan kurang mendasar. Perubahan-perubahan kurikulum hanya menciptakan konfigurasi baru dengan isi yang lama. Kritik Havelock dan Huberman (1977) dan World Bank (1980) yang

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi, Mengajar-Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, Tarsito, Bandung, hal 23

ditujukan pada pembaharuan pendidikan di negara-negara berkembang, termasuk sangat tepat untuk ditujukan pada pembaharuan pendidikan di Indonesia. Bahkan, banyak hal pembaharuan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia tidak mempunyai strategi monitoring dan prosedur evaluasi yang jelas dan memiliki argumentasi yang kuat.

Pada masa Orde Baru upaya peningkatan kualitas pendidikan, terutama mengenai pembaharuan kurikulum dirancanglah sebuah konsepsi Sekolah Pembangunan yang meniru sekolah komprehensif yang pernah dilaksanakan di Amerika Serikat. Rintisan Sekolah Pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah “Proyek Khusus” dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0172/1971 tertanggal 21 September 1971. Penyelenggaraan sekolah ini dilaksanakan oleh 8 IKIP di seluruh Indonesia, yakni: IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Surabaya, IKIP Semarang, IKIP Malang, dan IKIP Makassar.⁶

IKIP Padang dipercaya menyelenggarakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, merupakan satu diantara delapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah. Secara kualitatif, IKIP Padang sejak berdirinya di tengah perjuangan

⁶ Proyek Perintis Sekolah Pembangunan ini secara resmi dioperasikan tahun 1972 oleh 8 IKIP di seluruh Indonesia yang dikenal dengan nama Sekolah PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) untuk 3 jenjang sekolah, yakni SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Uraian lanjut tentang Sekolah PPSP ini lihat buku I. Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu (1959) hal. 247-248; dan Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya-Indonesia: Usaha Nasional (1983), hal 42.

revolusi telah membuktikan dedikasinya serta dikategorikan pencetak calon-calon guru yang berkualitas yang lulusan tersebar di Indonesia.⁷

Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Padang merupakan sekolah yang berada di lingkungan Kampus IKIP Padang (sekarang UNP) antara tahun 1972-1987. Gagasan utama mendirikan PPSP-IKIP Padang adalah dalam rangka penelitian, pembaharuan, dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Upaya pembaharuan pendidikan berpangkal dari usaha untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seperti menurunnya mutu pendidikan, kurang relevannya pendidikan dengan tuntutan pembangunan, adanya perbedaan hasrat memperoleh pendidikan, dan kemampuan sistem pendidikan untuk menampungnya (bidang masalah pemerataan), dan kurang efisien dan efektifnya pelaksanaan sistem pendidikan.⁸ Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka lahirlah PPSP yang bertumpu pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 041 tahun 1974 dan yang mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan pembaharuan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan PPSP di delapan LPTK tersebut tidak memiliki perbedaan, karena konsep PPSP sangat

⁷ IKIP Padang secara historis berasal dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar yang berdiri pada tahun 1954. Ini merupakan perguruan pertama di Sumatera Barat, dan setelah Indonesia merdeka pemerintah berupaya mencetak dan menyiapkan tenaga guru yang baik, sehingga didirikanlah 5 PTPG di Indonesia pada waktu itu, yakni di Batusangkar, Bandung, Yogayakarta, Malang, dan Menado. Pada awal berdirinya PTPG Batusangkar hanya membuka enam jurusan, yakni Bahasa Indonesia, Sejarah, Bahasa Inggris, Ekonomi, Ilmu Pasti, dan Biologi. Berdirinya PTPG di Batusangkar besar kemungkinan mengingat kapasitas Prof. Mr. Muhammad Yamin, S.H. yang pada saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang berasal dari Talawi (Batusangkar); dan perguruan tinggi ini tidak bertahan lama, terutama karena kekurangan tenaga dosen sehingga banyak mahasiswanya pindah ke Bandung dan Malang. Pada tahun 1956 pemerintah mengeluarkan kebijakan memasukkan PTPG seluruh Indonesia ke dalam universitas terdekat, dan PTPG Batusangkar menjadi bagian dari Universitas Andalas (Unand) yang didirikan pada tahun 1956 dengan nama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP). Kemudian, pada tahun 1964 FKIP Unand kembali dipisahkan menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan ((IKIP) Jakarta Cabang Padang. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 93 tanggal 24 Agustus 1999 IKIP Padang berubah nama menjadi Universitas Negeri Padang (UNP). Uraian ringkas sejarah perkembangan IKIP Padang lihat Mas'oed Abidin, dkk. *Ensiklopedi Minangkabau (Edisi Awal)*, Padang: PPIM (2005), hal. 422-423.

⁸ Tim Administrasi Sekolah PPSP, *Sistem dan Pengelolaan Sekolah PPSP Dalam Rangka Pembaharuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: BP3K (1981), hal. 1

sentralistik dibawah komando Pusat Kurikulum Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan unit pelaksanaan BP3K (Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan).

Berdasarkan uraian diatas penulis menganggap penting untuk melakukan pendalaman dan penelusuran secara jelas melalui penelitian tentang sejarah PPSP IKIP Padang 1972 - 1987. Penulis memiliki asumsi bahwa PPSP IKIP Padang dengan *comprehensive schoolnya* bertujuan untuk menjadi model pendidikan di Indonesia dan menjawab tantangan masalah pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian timbul pertanyaan mengapa PPSP ini tidak diteruskan oleh IKIP Padang ? Padahal di beberapa IKIP lainnya dikembangkan, seperti IKIP Jakarta yang tetap dipertahankan dengan berubah nama menjadi Labs School. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkapkan mengapa PPSP didirikan di IKIP Padang, bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum di PPSP dengan nuansa *comprehensive schoolnya*, bagaimana model pembelajaran sistem modul, pengelolaan, serta penyelenggaraan pendidikan di PPSP dan bagaimana pula peralihan PPSP ke Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP. Hal-hal ini akan ditulis dalam bentuk tesis dengan judul “Merintis Sekolah di Era Pembangunan : Sejarah PPSP - IKIP Padang 1972 - 1987.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sangat komplek ditinjau dari berbagai aspek, baik itu aspek teknis dan manajemen pelaksanaaan dimana didalamnya mencakup unsur penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik, perencanaan, penyiapan kurikulum dan mentalitas siswa.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka batasan masalah penelitian ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mendirikan PPSP dalam rangka pembaharuan pendidikan pada awal tahun 70-an yakni menyangkut sistem dan pengelolaan sekolah seperti kurikulum, pola pengelolaan proses belajar mengajar, dan pola pengelolaan pada PPSP IKIP Padang sampai tahun 1987. Untuk memudahkan dalam mengkaji persoalan di atas maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa didirikan PPSP di IKIP Padang?
2. Bagaimana sistem pendidikan dan kurikulum di PPSP dengan nuansa *comprehensive schoolnya*?
3. Bagaimana model pembelajaran sistem modul, pengelolaan, serta penyelenggaraan pendidikan di PPSP?.
4. Bagaimana peralihan dari PPSP ke Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan :

1. PPSP IKIP Padang.
2. Sistem pendidikan dan kurikulum di sekolah PPSP dengan nuansa *comprehensive schoolnya*?
3. Model pembelajaran sistem modul, pengelolaan, serta penyelenggaraan pendidikan di Sekolah PPSP
4. Peralihan dari Sekolah PPSP ke Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dan mempengaruhi prestasi belajar siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.
2. **Secara teoritis**, berguna bagi para peneliti dan kalangan akademisi dalam memahami sejarah pendidikan dan kebijakan pendidikan di Indonesia dan kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.
3. **Secara praktis**, dapat bermanfaat (a) bagi pengambil kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tentang keunggulan PPSP IKIP Padang, (b) bagi kalangan guru dapat jadi contoh tentang keunggulan PPSP IKIP Padang dengan sistem modulnya, pembelajaran *mastery learning* dan *continius progress*. Dan (c) bagi siswa-siswi masa kini dapat menjadi pelajaran dalam konsep pembelajaran mandiri dengan sistem modul dengan maju berkelanjutan yang dapat menanamkan prinsip belajar sendiri yang mendorong setiap siswa rajin membaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, Merintis Sekolah di Era Pembangunan : Sejarah PPSP IKIP Padang 1972 -1987 dapat disimpulkan.

1. Pada awal tahun 70 an pemerintah melakukan pembaharuan pendidikan dengan mendirikan “Sekolah Pembangunan” di 8 IKIP di di Indonesia. Salah satunya adalah di IKIP Padang. Alasan pemilihan IKIP Padang sebagai penyelenggara PPSP adalah pengaruh figur Rektor IKIP Padang yaitu Prof. Dr. Isrin Nurdin, yang merupakan salah seorang tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan nasional. Faktor lain adalah disebabkan IKIP Padang memiliki lokasi dan gedung yang memadai untuk Sekolah Pembangunan tersebut.
2. Penyelenggara PPSP di seluruh Indonesia adalah Pusat Kurikulum dengan BP3K (Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan). Di PPSP IKIP Padang jenjang persekolahan yang diterapkan adalah 8 - 3, artinya 8 tahun untuk jenjang SD dan SMP dan 3 tahun untuk SMA. Di SMA berlaku sistem semester seperti pada SMP dengan program inti dan program pilihan. Mulai tahun kedua program pilihan diberikan dengan sistem gugus (jurusan). Gugus yang ada ialah gugus PALMA atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika dan gugus SOSBA atau Sosial dan Bahasa. Pendekatannya pembelajaran disekolah PPSP diujicobakan konsep “*Mastery Learning*” dan “*Continuous Progres*” yang dikenal dengan “Maju berkelanjutan”. Bahan untuk memungkinkan peserta didik dapat belajar sendiri disiapkan dalam bentuk “Modul”. Konsep sekolah pembangunan

(*comprehensive school*) merupakan sistem persekolahan yang kurikulumnya luas atau mencakup banyak hal, menyediakan kemungkinan belajar kepada peserta didik (siswa sekolah) yang normal dan yang luar biasa pandai supaya mereka belajar dengan berhasil dan memuaskan, sesuai dengan bakat, minat, mencapai perkembangan yang maksimal. Sejalan dengan konsep maju berkelanjutan maka dalam pelaksanaannya siswa-siswa belajar berdasarkan kecepatan masing-masing dengan penggolongan lambat sedang dan cepat. Untuk siswa kelompok cepat dapat dijadikan tutor sebaya bagi teman-temannya kelompok lambat. Jika siswa lambat dan tidak mampu menyelesaikan pendidikannya maka paket keterampilan yang mereka ambil pada setiap semester dapat menjadi bekal bagi mereka untuk hidup, Kurikulum PPSP mernjadi dasar pembaharuan pendidikan Indonesia saat ini, misalnya struktur mata pelajaran, pemberian kredit setiap mata pelajaran, pembelajaran matematika, pemberian remedial, pembelajaran siswa cepat (akselerasi), pemberian keterampilan pada siswa (life skill), pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar.

3. Di PPSP pembelajaran dilakukan dengan sistem modul yang menekankan pentingnya dibangkitkan kebiasaan siswa belajar sendiri yang melahirkan kecendrungan siswa membaca sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Guru berfungsi sebagai pembantu, pendorong dan memfasilitasi siswa dalam belajar
4. PPSP IKIP Padang mencoba membuat rencana desiminasi, diseminasi tidak dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk pengimbasan menyeluruh ide-ide PPSP terhadap sekolah di Sumatera Barat adalah kerjasama IKIP Padang dengan PT. Semen Padang dengan menjadikan SD Semen Padang sebagai SD

Komparasi PPSP IKIP Padang dari tahun 1974 sampai tahun 1989. Setelah 14 tahun dalam masa uji coba proyek Sekolah PPSP dihentikan tahun 1987. Lokasi PPSP ditempati oleh SD Percobaan, SMP 26 dan SMA 8. Pengurus KORPRI IKIP Padang membentuklah suatu yayasan dengan akta Notaris Yuyu Trisanti, SH pada tanggal 1 September 1989 mendirikan SMA Pembangunan KORPRI IKIP Padang menyusul SMP tahun 1995 dan SD Pembangunan tahun 2001. Rektor Prof. Dr. Z. Mawardi Efendi M.Pd mengambil alih sekolah-sekolah dibawah naungan Yayasan Pendidikan KORPRI UNP dan mengeluarkan kebijakan Pengembangan Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Padang menuju sekolah dengan pelayanan unggul dengan membagi tujuan dalam 5 tahapan, yaitu tahap dasar, tahap rehabilitasi dan konstruksi, tahap konsolidasi, tahap pengembangan dan tahap pemantapan.

B. Implikasi

1. Figur seorang tokoh sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan, oleh sebab itu diharapkan tokoh-tokoh pendidikan dari Sumatera Barat untuk berkiprah di tingkat nasional sehingga mempengaruhi kemajuan pendidikan baik di Kota Padang khususnya maupun di Sumatera Barat pada umumnya. Penunjukan IKIP Padang sebagai salah satu penyelenggara PPSP di Indonesia berupa SD, SMP dan SMA PPSP IKIP Padang menghasilkan sekolah yang dikenal dan bermutu di Sumatera Barat.
2. Prinsip-prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan dan pembelajaran dengan modul telah terbukti berhasil menghasilkan lulusan yang bagus oleh sebab itu perlu kiranya diterapkan kembali di sekolah-sekolah di Indonesia. *Comprehensive school* atau Sekolah Pembangunan dengan pemberian mata

pelajaran keterampilan *life skill* yang lengkap dan bervariasi antar jenjang pendidikan menghasilkan siswa-siswi yang mandiri dan memiliki keterampilan yang memadai sehingga setelah menamatkan pendidikan mereka berguna ditengah-tengah masyarakat

3. Berdasarkan penelitian ini pembaharuan pendidikan yang dilakukan pemerintah melalui PPSP IKIP Padang dengan pembelajaran sistem modul melahirkan siswa-siswi yang gemar membaca, mandiri dan terampil, disamping itu pengelolaan sekolah yang tersrtuktur dengan pendanaan yang memadai mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan zaman.
4. Penyelenggaraan PPSP IKIP Padang dilaksanakan dengan pendanaan yang cukup melalui Proyek PPSP, ketika dana pemerintah habis maka Proyek PPSP dihentikan secara nasional tahun 1986. IKIP Padang menyerahkan sekolah tersebut ke Kanwil P dan K Sumatera Barat, sehingga di lokasi tersebut berdiri SD Percobaan, SMP 26 Padang dan SMA 8 Padang sampai tahun 1994.

C. Saran

1. Kebijakan pemerintah mendirikan Sekolah PPSP di 8 IKIP di Indonesia telah mampu menjadi peletak dasar kemajuan pendidikan menengah di Indonesia. Pembaharuan-pembaharuan tersebut seperti adanya kelompok cepat, normal dan lambat (sekarang dikenal dengan akselarasi), pembelajaran dengan sistem modul, Bimbingan dan Penyuluhan (sekarang dikenal dengan Bimbingan dan Konseling), remedial dan pengayaan, pemberian mata pelajaran keterampilan yang bervariasi telah melahirkan siswa yang mandiri, mampu bersaing baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang kehidupan lainnya. Sekolah PPSP yang dianggap berhasil ini akhirnya dibubarkan tahun 1987. Ide-ide

pembaharuan yang pernah dilaksanakan di sekolah PPSP IKIP Padang tersebut hendaknya dapat dilanjutkan kembali di sekolah-sekolah yang berada dibawah Direktur Sekolah Pembangunan UNP. Pembaharuan ini sejalan dengan semangat Universitas Negeri Padang yang melakukan revitalisasi Sekolah Pembangunan.

2. Pelaksanaan suatu pembaharuan pendidikan sebaiknya tidak melepaskan dari struktur atau sistem yang ada. Kasus Sekolah PPSP yang hanya berinduk kepada BP3K di Jakarta tanpa ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyebabkan siswa-siswa Sekolah PPSP memiliki ijazah yang berbeda dengan siswa sekolah umum lainnya. Hal ini menimbulkan masalah ketika siswa-siswi PPSP melegalisir ijazah mereka ada keengganan instansi terkait karena ijazah yang berbeda.
3. Sistem pendidikan *comprehensive* telah melahirkan siswa-siswa yang memiliki keterampilan yang memadai dan membekali diri mereka setelah terjun ke masyarakat, oleh sebab itu perlu kiranya Sekolah-sekolah Pembangunan Laboratorium UNP melalui Direktur Sekolah Pembangunan UNP untuk memperbanyak sarana-saran seperti tempat workshop untuk melatih siswa-siswa dalam bidang keterampilan yang dipilihnya. Pemilihan bidang keterampilan tentu harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi masa kini. Perlu kiranya Direktur Sekolah Pembangunan membentuk suatu tim ahli dari UNP dan dari Sekolah Pembangunan untuk merancang kembali sistem modul untuk dilaksanakan kembali di Sekolah Pembangunan walaupun sistem akselarasi tidak lagi dilaksanakan, sistem pembelajaran modul mampu melahirkan siswa-siswa yang memiliki minat

baca yang tinggi, pribadi mandiri dan memiliki semangat untuk selalu maju menuju pendidikan tinggi.

4. Penghentian Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di 8 IKIP di Indonesia dilakukan tahun 1987, termasuk di IKIP Padang. Sekolah-sekolah tersebut adalah SD, SMP dan SMA PPSP IKIP Padang. Tiga tahun kemudian, warga IKIP Padang serta masyarakat sekitarnya merasakan sulitnya melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke sekolah negeri. Oleh sebab itu atas inisiatif Drs. H. Nazir dan adanya izin dari rektor IKIP Padang pada masa itu didirikanlah SMA Pembangunan KORPRI IKIP Padang tahun 1990, dilanjutkan dengan pendirian SMP tahun 1995 dan SD tahun 2001. Adalah suatu kebutuhan juga bagi UNP sebagai Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan untuk secara resmi menjadikan Sekolah Pembangunan ini sebagai bagian resmi dari Universitas Negeri Padang, sehingga menghilangkan anggapan selama ini Sekolah Pembangunan tidak merupakan bagian dari Universitas Negeri Padang. Selama ini Sekolah Pembangunan telah memakai semua fasilitas dari Universitas Negeri Padang, bahkan telah menempati 3 gedung baru yang sangat representatif.
5. Untuk membangkitkan kembali “batang tarandam” pihak UNP dan Direktur Sekolah Pembangunan harus segera melakukan konsolidasi tenaga kependidikan, kurikulum, rekrutmen siswa dan integrasi program-program Tridarma UNP.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik. *Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of 20th Century*, dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1972.
- _____. *School and Politics: The KaumMuda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, Monograph Series, Ithaca-New York: Cornell Modern Project South East Asia Program Cornell University, 1971.
- Amri, Sofian dan Ahmadi, Khoirul. 2010. *Kostruksi Pengembangan Pembelajaran*. Jakarta. Prestasi Pustakaraya.
- Asnan, Gusti, Nopriyasman, dan Syafrizal Adabiah. 2013. *Perintis Pendidikan Moderen di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Ombak.
- Beeby, C.E. 1982. *Pendidikan Di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. Jakarta: LP3ES.
- Beeby, C.E. 1984. *Perencanaandan Administrator Pendidikan*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Budiman, Hikmat, 2002. *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Daya, Burhanuddin. 1990. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: Tiara WacanaYogya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1973, *Kebijaksanaan Dasar dan Strategi Pembaharuan Pendidikan Melalui Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan*, Depdibud, Jakarta.
- _____. 1976. *Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi PPSP Ke VII 9 – 11 Desember 1976 (Buku III)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1976. *Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengajaran dengan Modul pada PPSP Pada Taraf Pengembangan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1981, *Sistem dan Pengelolaan Sekolah PPSP dalam Rangka Pembaharuan Pendidikan Nasional*, Depdikbud, Jakarta.